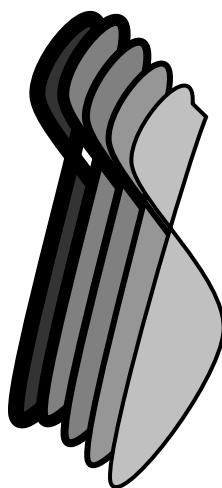




PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**



**KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS
KOTA SIBOLGA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2019, sesuai amanat dari Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta PermenPAN RI No. 29 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kecamatan Sibolga Sambas, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan rencana strategis Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2016-2021, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance* .

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir Kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Sejarah Singkat Kecamatan Sibolga Sambas	3
D. Gambaran Singkat Organisasi	4
E. Kondisi Geografis	6
F. Gambaran Umum Kecamatan SibolgaSambas	6
G. Permasalahan Makro dan Prioritas Pembangunan Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2020	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
I. Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas	14
1. Visi dan Misi	14
2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sibolga Sambas	15
A. Tujuan	15
B. Sasaran	16
II. Strategis dan Kebijakan Kecamatan Sibolga Sambas	16
A. Strategi	16
B. Kebijakan	18
C. Sasaran dan Indikator	20
D. Penetapan Kinerja (PK)	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
✚ Analisis dan Evaluasi Kinerja	27
✚ Prestasi Yang Dicapai	34
✚ Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
B. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

LAMPIRAN TABEL I DAN TABEL II

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2024.....	7
Tabel 1.2	Pelayanan Publik di Kecamatan Sibolga Sambas	8
Tabel 1.3	Komposisi PNS Kecamatan Sibolga Sambas menurut Jenjang Pendidikan.....	9
Tabel 1.4	Keadaan Barang Inventaris Kecamatan Sibolga Sambas 2024.....	10
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2024.....	23
Tabel 3.1	Matriks Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kecamatan Sibolga Sambas.....	24
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Kinerja Keuangan	39
Tabel 3.3	Tabel Rencana dan Realisasi Penggunaan Anggaran 2024.....	39
Tabel 3.4	Realisasi APBD Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas.....	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Sibolga Sambas merupakan salah satu perangkat daerah Kota Sibolga yang berfungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002. Berdasarkan kebijakan tersebut Kecamatan Sibolga Sambas memegang peranan yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada era reformasi dan otonomi daerah ini, fungsi pelayanan mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal semangat pelayanan publik upaya perbaikan dan peningkatan mutu kualitas pelayanan bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah khususnya Kecamatan Sibolga Sambas. Selain peningkatan pelayanan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum mutlak dilaksanakan dimana sasarannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat kecamatan melalui keikutsertaan atau partisipasi dalam program yang telah difasilitasi oleh pemerintah (dinas terkait) guna peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 yang didasarkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010, dan juga untuk menjalankan capaian-capaian baik program ataupun kegiatan yang ada dalam RPJMD 2016 - 2021.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan - pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2018. Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan ini yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sibolga Sambas rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai

yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini khususnya waktu penyelesaian pelayanan KTP dan KK sampai tingkat kecamatan selama 1 hari kerja dan diusahakan kedepannya untuk dapat selesai kurang dari 1 hari. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang datang mengurus KTP dan KK tidak pada waktu yang sama dalam 1 hari kerja. Sementara aparat di kelurahan harus berulang kali ke kantor Kecamatan untuk mengantarkan berkas permohonan yang ada, Dalam rangka efektivitas dan efisiensi baik tenaga, waktu maupun biaya operasional walaupun pada akhirnya akan menambah waktu penyelesaian pelayanan di tingkat kecamatan.

Dari evaluasi kinerja atas keberhasilan dan target strategi pencapaian Visi dan Misi Organisasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga menurut Indikator Kinerjanya maka capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan prima dan profesional, dinyatakan Sangat Baik dengan nilai capaian realisasi sebesar 100%;
- a. Terlaksananya koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan Musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita, dinyatakan Sangat Baik dengan nilai capaian realisasi sebesar 100%;
- b. Partisipasi keterampilan masyarakat guna peningkatan kualitas diri dan Partisipasi *Self Mobilization (memobilisasi diri sendiri)* terlibat pada program, kegiatan dan kebijakan pemerintah, dinyatakan sangat baik dengan nilai capaian 100%.

Secara Umum capaian Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dinyatakan **MEMUASKAN** karena capaian Kinerja Tahun 2023 diperoleh rata-rata nilai capaian akhir sebesar **92 %**.

Sibolga, Februari 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1.2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Sibolga Sambas yang merupakan kecamatan termuda dari 4 (empat) kecamatan dalam lingkup daerah Kota Sibolga, terletak pada posisi 98°45'- 98° 46' 30" 98° 48' dan 01° 45'-01° 42' LU, yang membentang disepanjang pesisir Teluk Tapan Nauli dan membujur dari Barat daya ke Tenggara di Kaki Pegunungan Bukit Barisan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Kota
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Selatan
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Teluk Tapan Nauli

1.2.2 Luas Wilayah

Luas Kecamatan Sibolga Sambas $\pm$ **554,9 Ha**, dengan rincian menurut Kelurahan sebagai berikut :

- Kelurahan Pancuran Kerambil : Luas Wilayah $\pm$ 92,06 Ha
- Kelurahan Pancuran Dewa : Luas Wilayah $\pm$ 127,80 Ha
- Kelurahan Pancuran Bambu : Luas Wilayah $\pm$ 227,50 Ha
- Kelurahan Pancuran Pinang : Luas Wilayah $\pm$ 107,54 Ha

1.2.3 Sumber Daya Aparatur.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan Kecamatan Sibolga Sambas didukung oleh 81 orang aparatur yang terdiri dari 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 28 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 17 orang Kepala Lingkungan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	-
2.	S1	35
3.	D4	2
4.	D3	4
5.	D2	-
6.	D1	-
7.	SLTA	21
8.	SLTP	-
9.	SD	-

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

No.	Golongan/ Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	IV/d	-
2.	IV/c	-
3.	IV/b	-
4.	IV/a	-
5.	III/d	7
6.	III/c	13
7.	III/b	8
8.	III/a	5
9.	II/d	-
10.	II/c	1
11.	II/b	1
12.	II/a	-
13.	I/d	1
14.	I/c	-
15.	I/b	-
16.	I/a	-

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Esolon	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camat	III.a	-
2.	Sekretariat :		
	Sekretaris Camat	IV.a	1
	1. Kasubbag program dan Keuangan	IV.b	1
	2. Kasubbag umum, kepegawaian dan perlengkapan	IV.b	-
3.	Seksi-seksi :		
	- Kepala Seksi Pelayanan	IV.a	1

	- Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	IV.a	1
	- Kepala Seksi PPM	IV.a	1
	- Kepala Seksi Kessos	IV.a	1
4.	Staf	-	5
5.	Lurah	IV.a	4
6.	Sekretaris Lurah	IV.b	3
7.	Seksi-seksi :		
	Kepala Seksi Pelayanan & Kesejahteraan	IV.b	4
	Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	IV.b	4
	Kepala Seksi PPM	IV.b	4
8.	Staf	-	6

1.2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sibolga Sambas.

Adapun jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sibolga Sambas berdasarkan hasil pendataan barang inventaris Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.5
Jumlah dan kondisi inventaris
Kecamatan Sibolga Selatan per Desember 2024.

NO.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Komputer	6	2	2	2
2.	Infokus	5	2	2	2
3.	Layar Infocus	5	-	-	5
4.	Genset	2	-	-	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	AC	10	5	3	2
6.	Meja Kerja Biro	9	9	-	-
7.	Meja Kerja Camat (Biro	1	1	-	-
8.	Meja 1/2 Biro	30	30	-	-
9.	Kursi Putar	13	10	-	3
10.	Kursi Kerja	10	10	-	-
11.	Kursi Rapat	30	28		2
12.	Lemari 3 Pintu	1	1	-	-
13.	Lemari 2 Pintu	8	8	-	-
14.	Sofa	5	5	-	-
15.	Soundsystem	4	3	-	1
16.	Laptop	12	7	-	5
17.	Printer	17	10	-	7
18.	Meja Komputer	3	-	-	3
19.	Gorden	8	-	-	4
20.	Rimpel Meja	2	-	-	2
21.	Lemari Bank Data Penduduk	1	1	-	-
22.	Camera Digital	5	1	-	4
23.	Sound System	4	1	-	3
24.	BRANKAS	1	1	-	-
25.	Bangku Tunggu Tamu	1	1	-	-
26.	Penghancur Kertas	1	-	1	-

1.2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5887) dan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor : 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor : 12). Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

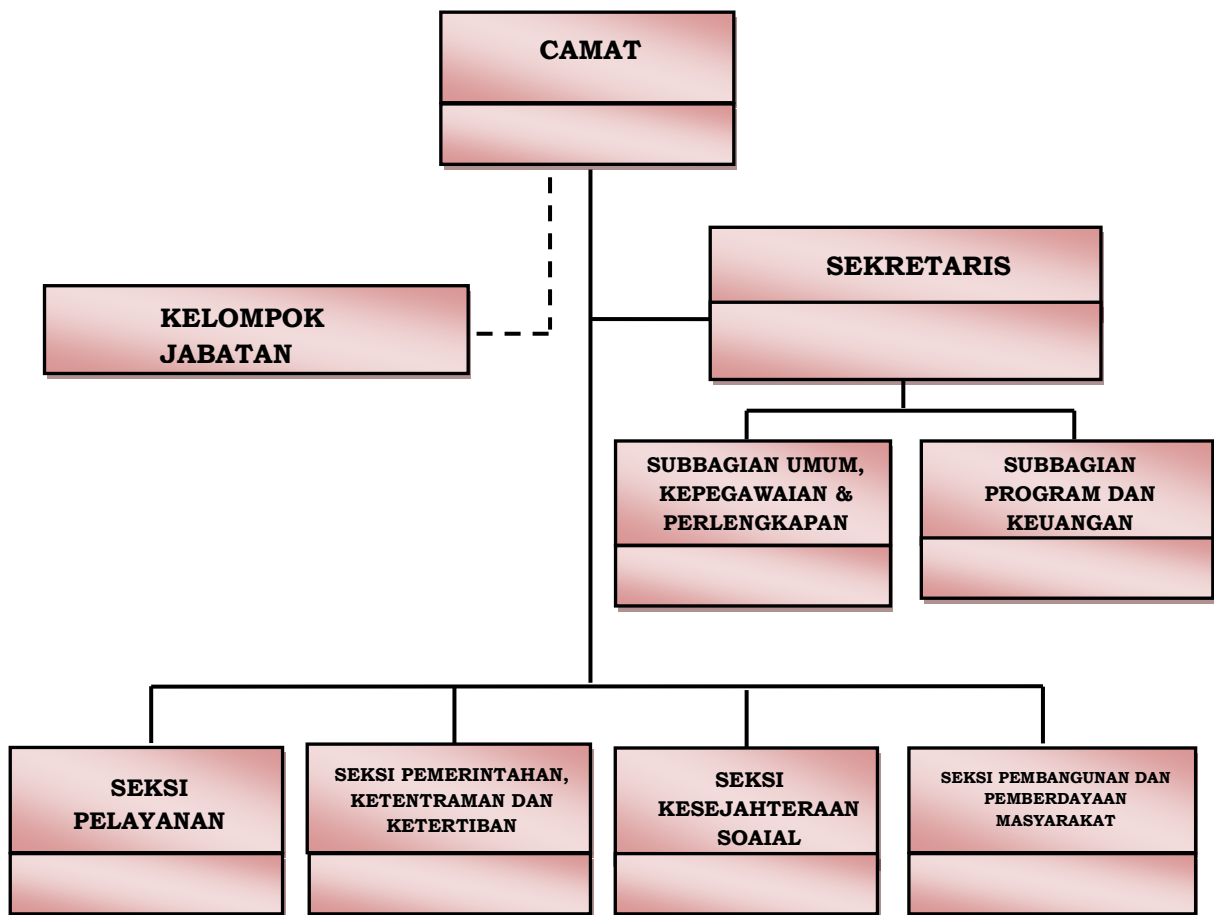
- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g) membina dan mengawasi *penyelenggaraan kegiatan kelurahan*;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota. Pelimpahan kewenangan dimaksud ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga, adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Kepala Seksi Pelayanan;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan : ——— Garis Komando
 Garis Koordinasi

1.2.6 Gambaran Umum Pelayanan

Jenis Pelayanan Publik yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah di lingkup Kecamatan Sibolga Sambas meliputi Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan dan Pelayanan Perizinan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan diwujudkan dalam uraian garis besar sebagai berikut :

Tabel 1.6
Jenis Pelayanan Publik di Kecamatan Sibolga Selatan.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A.	Administrasi Kependudukan			Waktu penyelesaian pelayanan sampai pada tingkat kecamatan, bukan pada tahap terbitnya dokumen
	1. Surat Keterangan Ahli Waris	Terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris	1 Hari	
	2. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	1 Hari	
	3. Rekomendasi Permohonan Nikah	Terbitnya Rekomendasi Permohonan Nikah	1 Hari	
	4. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak mampu	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu	1 Hari	
B.	Perizinan			
	1. Surat Izin Usaha (kecil/Mikro)	Terbitnya Surat Surat Izin Usaha (kecil/Mikro)	1 Hari	
	2. Surat Rekomendasi Permohonan Surat Kematian	Terbitnya Rekomendasi Permohonan Surat Kematian	1 Hari	
	3. Legalisir Dokumen	Terbitnya Legalisir Dokumen	1 Hari	

Sejak Tahun 2024 Kecamatan Sibolga Sambas hanya melayani permohonan administrasi berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Rekomendasi Permohonan Nikah, Rekomendasi Surat Keterangan

Tidak Mampu dan Surat Izin Usaha (kecil/Mikro), Legalisir Dokumen dan Surat Rekomendasi Permohonan Surat Kematian sedangkan pengelolaan administrasi kependudukan berupa KTP, KK, Pindah, Kematian, dan Kelahiran langsung ditangani oleh OPD yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga.

1.2.7 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Sibolga Sambas, adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang dari Walikota kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Peningkatan kualitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;
3. Mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sibolga Sambas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, jumlah pegawai maupun karena kompetensi,
2. Masih adanya jabatan yang belum terisi (lowong) di Kecamatan maupun di Kelurahan;
3. Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga merupakan kawasan rawan bencana alam (Banjir dan tanah longsor).

1.2.8 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tahun 2024 Kecamatan Sibolga Sambah Sibolga didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga. Alokasi anggaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.7
Alokasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Belanja Daerah	7.912.220.127	7.367.708.483	(544.511.644)
5.1	Belanja Operasi	7.771.087.327	7.226.575.683	(544.511.644)
5.1.01	Belanja Pegawai	5.217.891.017	5.033.652.152	(184.238.865)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.553.196.310	2.192.923.531	(360.272.779)
5.2	Belanja Modal	141.132.800	141.132.800	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.132.800	141.132.800	-
	Jumlah Belanja	7.912.220.127	7.367.708.483	(544.511.644)
	Total Surplus/Defisit	(7.912.220.127)	(7.367.708.483)	

1.3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Kecamatan Sibolga Sambah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi saat ini

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Sibolga, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Sibolga telah menetapkan Visi, Misi dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan Visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kota Sibolga sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR ”

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Sibolga Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar

terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City);

4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru;
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama maupun di luar kota sibolga.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut diatas, maka rencana strategis yang dikembangkan di Kecamatan Sibolga Sambas adalah :

1. Menetapkan standar pelayanan di Kecamatan yang jelas, mudah, transparan, dan akuntabel;
2. Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, Lokakarya dan sebagainya;
3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai koordinator kebijakan kepala daerah di tingkat wilayah;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegrasi tinggi;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring pembangunan.

8. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dan olahraga dalam peningkatan prestasi dan minat olahraga;
9. Melestarikan seni dan budaya masyarakat.

Strategi di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan Kecamatan Sibolga Sambas untuk Tahun 2021-2026, dan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Sibolga Sambas selama periode Tahun 2016–2021. Kebijakan Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM baik teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tufoksi Kecamatan Sibolga Sambas;
- d. memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan, azas kepatutan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku;
- e. Peningkatan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan, fasilitasi perencanaan pembangunan melalui Musrenbang;

- g. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- h. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan posyandu, lembaga dan organisasi masyarakat;
- i. Mengedepankan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi internal dengan seksi-seksi yang ada di kecamatan dan eksternal dengan OPD se-Kota Sibolga.

Dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026, Kecamatan Sibolga Sambas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang pada hakekatnya adalah berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan harkat hidup melalui pemanfaatan sumber daya dan aparatur yang ada.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran. Mengacu pada tujuan dan sasaran kinerja rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2016-2021 maka disusun indikator kinerja Kantor Camat Sibolga Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagaimana pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Umum	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok

yang baik	Penyampaian Dokumen Perencanaan tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 org/ bln	50 org/ bln	50 org/ bln	50 org/ bln	50 org/ bln
	Penyampaian Pertanggung jawaban keuangan tepat waktu	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org
		Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap
		Jumlah unit kendaraan	7 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit

			perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap
			Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
			Jumlah Mebel yang dipelihara	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan berkualitas	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat guna peningkatan keterampilan dan kualitas	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
			Jumlah Laporan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap

		diri	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di luarurahan	7 Lk	7 Lk	7 Lk	7 Lk	7 Lk
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
3.	Koordinasi Lintas Sektoral yang efektif dalam menunjang pembangunan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
			Jumlah Dokumen Fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam (Perubahan) Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga 2021-2026, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu;
3. Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu;
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan;
5. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan;
6. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan;
7. Frekuensi Pelaksanaan Gotongroyong;
8. Frekuensi Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat;
9. Frekuensi Pameran Pembangunan dalam Rangka Hari Jadi Sibolga;
10. Jumlah Peserta pada pelaksanaan Porkot;
11. Jumlah Balita Kemas/Posyandu Balita dan Lansia yang menerima makanan tambahan;
12. Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Sibolga Sambas;
13. Monitoring Tim Delegasi Kecamatan pada Penilaian Kelurahan terbaik dan Kelurahan Percontohan;
14. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sibolga Sambas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	85%	90%	95%	100%
		Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	75%	80%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	A	A	A	A	A

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 diwujudkan dalam 4 (empat) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. **7.367.708.483**

Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja Kecamatan Sibolga Selatan untuk tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Kecamatan Sibolga Sambah Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90
		Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksanannya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	%	90
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambah	%	A

2.3 PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
2	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksanannya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	90%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	A

Program

Anggaran

- | | | | |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota | Rp. | 6.888.625.677 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 137.616.900 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 827.803.600 |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 46.816.200 |

Seluruh kegiatan Kecamatan Sibolga Sambas yang tertuang dalam Rencana Kerja Awal didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga, terdiri dari 3 (tiga) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, dengan jumlah pagu sebesar Rp. **7.912.220.127**, kemudian setelah dilakukan Rencana Kerja Perubahan menjadi 3 (tiga) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan jumlah pagu sebesar **7.367.708.483**

Untuk lebih jelasnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sibolga Sambas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SIBOLGA SELATAN.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
2	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	90%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	A

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Rp. 6.382.299.837
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 114.376.900
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 827.803.600
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 43.228.146

Adapun Anggaran Belanja Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2024, yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Anggaran Belanja Per sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
				Administrasi Keuangan Perangkat daerah	5.027.852.152
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.480.940
					-
				Penyediaan Jasa	910.582.235

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.384.510
2.	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	- Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraa n realisasi hasil perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.803.600
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas			

2.4 METODE PENGUKURAN/MANUAL INDIKATOR KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kota Sibolga.

Kecamatan Sibolga Sambas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024, dengan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan unit penanggungjawab pada masing-masing indikator kinerja untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Unit Penanggungjawab Per sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Penanggungjawab				
				Sekret	Kasi PPM	Kasi Pem dan Trantib	Kasi Pelayanan	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	- Meningkatnya Pelayanan Umum	- Indeks Kepuasan Masyarakat -	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	√			√	√
2.	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	- Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		√			√

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan			√		√

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kerja

INTERVAL NILAI	KATEGORI
$91\% \leq 100$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Adapun pengukuran kinerja Kegiatan Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2024.

Tabel 3.1.1
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No.	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum		Indek Kepuasan Masyarakat	100%	90%	90%	Sangat Tinggi	Kantor Camat Sibolga Sambas
2	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita		Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	100%	90%	90%	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	A	A	100%	Sangat Tinggi	

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sibolga Sambas tahun 2024 dengan nilai akumulasi rata-rata capaian kegiatan 79,13%, dengan kategori “**Tinggi**”.

- Perbandingan antara realisasi kinerja dengan serta capaian kinerja Tahun 2024, dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1.2
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Thn 2022	Thn 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	85	100	90	90%
2	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	- Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	75	80	100	90	90%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	A	A	A	A	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat dari semua indikator ada beberapa indikator yang mengalami penurunan, bahkan ada yang sama sekali tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana strategis (Renstra).

Tabel 3.1.3
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun
ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	100	90%
2	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	90	100	90%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan Sibolga Sambas	A	A	100%

Dari Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	90%	100	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
2	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	90%	90%	100	Terlaksanannya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat	- Selalu mengikut sertakan tokoh masyarakat maupun kepemudaan disetiap kegiatan
							- Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	-	-	Mengoptimalkan penggunaan system informasi berbasis aplikasi agar dapat menghasilkan data dan informasi yang relevan , akurat dan tepat waktu	Terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tidak berdampak buruk terhadap capaian kinerja Kecamatan, namun berdampak terhadap tingginya beban kerja individu. Efisiensi sumber daya terjadi pada Kecamatan Sibolga Selatan berupa optimalisasi beban kerja kepada seluruh pegawai Kecamatan, karena terbatasnya jumlah SDM.

Adapun efesiensi penggunaan anggaran dari sasaran strategis Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesiensi
			Tar Get	Real isasi	% Capai an	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	100	6.382.299.837	4.497.444.555	70	1.884.855.282
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	-	-				
3	Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan	90	90	100	27.803.600	27.217.600	98	586.000

Dari tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran diatas, maka Kecamatan Sibolga Sambas untuk Tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 7.367.708.483 memperoleh efesiensi anggaran sebesar Rp. 544.511.644 atau 8,26%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien, dengan berdasar pada perhitungan pencapaian output kegiatan, dari 3 (tiga) program, 10 (kegiatan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) subkegiatan yang ada. Sedangkan efesiensi penggunaan sumber daya keuangan pada kegiatan lainnya secara umum selain ditunjang oleh perencanaan yang baik dan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan, juga adanya komitmen dan komunikasi efektif antara pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat

Adapun analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	- Meningkatkan Pelayanan Umum			1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyaluran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
	-			2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan upaya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
	-			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
	-			4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
	-			5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			100	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan berkualitas			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
	- Terlaksanannya Koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa, pemberian makanan tambahan serta pendidikan usia dini bagi balita	Persentase Kepuasan terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan		1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
				2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
				3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pemberdayaan mukim	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan			-				

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tahun anggaran 2024 Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga sebesar Rp. 7.367.708.483 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.197.982.715 atau 70,55%.

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis per program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(4/5)*100
1.	- Meningkatkan Pelayanan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.944.615.510	5.353.970.320	90,06
	-	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.027.852.152	3.257.698.133	65
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.480.940	251.133.250	83
		3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	910.582.235	865.977.172	95
		4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	142.384.510	122.636.000	86
2.	- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat guna peningkatan keterampilan dan kualitas diri	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	827.803.600	557.415.800	67.34
		1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.803.600	27.217.600	98
		2. Pemberdayaan	658.867.200	530.198.200	59

		Masyarakat di Kelurahan			
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	141.132.800	140.964.600	99.88
3.	- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				

Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebesar 99,88% dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebesar 95,81%, Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 59%.

Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,382,299,837	4,497,444,555	70
	1). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,027,852,152	3,257,698,133	65
	(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,027,852,152	3,257,698,133	65
	2). Administrasi Umum	301,480,940	251,133,250	83

	Perangkat Daerah			
	(1). Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	19,756,000	14,557,400	74
	(2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,999,900	97,018,000	83
	(3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,800,000	19,152,900	97
	(4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,266,240	63,163,950	97
	(5). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,060,500	16,571,500	97
	(6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,620,700	12,620,100	99,99
	(7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,977,000	28,049,400	56
	3). Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	910,582,235	865,977,172	95
	(1). Penyediaan jasa surat menyurat	5,175,000	2,748,000	53
	(2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	112,007,235	69,829,172	62
	(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793,4000,000	793,4000,000	100
	6). Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	142,384,510	122,636,000	86

	(1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	51,989,400	33,639,000	65
	(3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,040,000	26,560,000	98
	(4). Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	63,355,110	62,437,000	99
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	114,376,900	102,641,700	90
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	53,379,800	50,171,500	94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53,379,800	50,171,500	94
	2). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60,997,100	52,470,200	86
	(1). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	229.607.500	226.772.820	86
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	27,803,600	27,217,600	98
	1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27,803,600	27,217,600	98
	(1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	27,803,600	27,217,600	98

	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ketertiban umum			
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43,228,146	40,480,660	94
	1). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	43,228,146	40,480,660	94
	(1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43,228,146	40,480,660	94
	KELURAHAN PANCURAN BAMBU	200,000,000	122,200,250	61
	1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153,183,800	75,431,800	49
	(1). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153,183,800	75,431,800	49
	2). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46,816,200	46,768,450	99,98
	(1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46,816,200	46,768,450	99,98
	KELURAHAN PANCURAN DEWA	200,000,000	158,056,050	79
	1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153,183,800	111,282,600	73
	(1). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153,183,800	111,282,600	73
	2). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46,816,200	46,768,450	99,98
	(1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga	46,816,200	46,768,450	99,98

	Kemasyarakatan			
	KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL	200,000,000	124,590,450	62
	1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153,183,800	77,817,000	51
	(1). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153,183,800	77,817,000	51
	2). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46,816,200	46,773,450	99,98
	(1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46,816,200	46,773,450	99,98
	KELURAHAN PANCURAN PINANG	200,000,000	124,590,450	62
	1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	153,183,800	78,578,000	51
	(1). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153,183,800	78,578,000	51
	2). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46,816,200	46,773,450	99,98
	(1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46,816,200	46,773,450	99,98

Pada realisasi Anggaran Dakel Kelurahan ada terjadi penundaan Pembayaran sehingga berdampak pada serapan realisasi Anggaran DAKEL Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2023
dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2022	
			(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,382,299,837	4,497,444,555	70	5,256,062,470	90,58	5.184.541.245	88,05
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,027,852,152	3,257,698,133	65	3,196,050,608	88,13	3.689.174.711	85,14
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.531.459.725	3.069.706.938	65	3,196,050,608	88,13	3.689.174.711	85,14
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	119,070,810	99,34	18.942.000	98,04
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	119,070,810	99,34	18.942.000	98,04
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,480,940	251,133,250	83	448,389,100	89,06	190.616.966	87,45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	19,756,600	14,557,400	74	27,399,500	98,18	11.952.800	98,72
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,999,900	97,018,000	83	154,649,600	96,66	105.484.216	96,16
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19,800,000	19,152,900	97	27,339,500	92,99	10.394.100	84,71
1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,266,240	63,163,950	97	96,464,500	97,41	38.259.100	95,62
1.2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,060,500	16,571,500	97	30,900,500	99,71	6.250.750	40,48
1.2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,620,700	12,620,100	99,98	19,270,000	99,23	0,00	0,00
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,977,000	28,049,400	56	92,305,500	67,53	18.276.000	64,26
1.3	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	136.976.540	99,19	0,00	0,00
1.3.1	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	213,554,550	99,29	0,00	0,00
1.3.3	Pengadaan Peralatan Mebel	0,00	0,00	0,00	213,554,550	99,29		
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910,582,235	865,977,172	95	899,012,243	95,46	1.221.480.168	98,65
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,175,000	2,748,000	53	7,980,000	100	5.000.000	92,59
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,007,235	69,829,172	62	76,332,243	64,90	70.080.168	81,11
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	793,400,000	793,400,000	100	814,700,000	99,82	1.146.400.000	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142,384,510	122,636,000	86	310.610,159	95,22	64.327.400	98,65
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,989,400	33,639,000	65	69,668,659	87,93	48.392.400	91,34
1.5.2	Pemeliharaan Mebel	0.00	0,00	0,00	4,500,000	50	0,00	0,00
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,040,000	26,560,000	98	36,987,500	97,21	15.935.000	60,36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	63,355,110	62,437,000	99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	114,376,900	102,641,700	90	130,370,350	88,57	162.796.542	67,54
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	6,935,000	89,43	74.426.292	99,47
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	6,935,000	89,43	74.426.292	99,47
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	53,379,800	50,171,500	94	35,352,600	75,63	13.964.200	100
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	53,379,800	50,171,500	94	35,352,600	75,63	13.964.200	100
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	60,997,100	52,470,200	86	88.082,750	95,03	66.138.550	54,13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	60,997,100	52,470,200	86	88.082,750	95,03	66.138.550	54,13
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	827,803,600	557,415,800	67	1,051,328,696	98,11	8.267.500	27.50
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	640,538,800	370,327,000	58	263,297,800	96,94	8.267.500	27.50
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	27,803,600	27,217,600	98	17,910,000	94,66	0,00	0,00
3.1.2	Evaluasi Kelurahan	0,00	0,00	0,00	8,596,600	67,81	8.267.500	60,91
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	612,735,200	343.109,400	56	236,791,200	98,66	0,00	0,00
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	187,264,800	187,088,800	99,98	303,570,796	98,79	0,00	0,00
3.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	187,264,800	187,088,800	99,98	303,570,796	98,79	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.3	Pemberdayaan Mukim	0,00	0,00	0,00	484,460,100	98,33	0,00	0,00
3.3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	0,00	0,00	0,00	484,460,100	98,33	0,00	0,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43,228,146	40,480,660	94	50,385,000	92,50	415.097.950	99,25
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	43,228,146	40,480,660	94	0,00	0,00	415.097.950	99,25
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di Wilayah Kecamatan	43,228,146	40,480,660	94	50,385,000	92,50	415.097.950	99,25
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.298.000	97,32
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.298.000	97,32
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.298.000	97,32

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Tahun 2024 merupakan bentuk penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Walaupun ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2024, akibat adanya refocusing anggaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun 2024 dengan 4 sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Sambas Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sibolga, Februari 2025.

Pt. CAMAT SIBOLGA SAMBAS



ARDHIANSA WANGGABEAN, S.STP

NIP. 19922/13 201406 1 002